

Analisis Determinan Ketidaktuntasan Belajar 12 Tahun Penduduk 18-24 di Provinsi Sumatera Selatan 2019

Budi Hartono¹, Yaya Setiadi²
Politeknik Statistika STIS^{1,2}
setiadi@stis.ac.id

Abstrak—Tingkat pendidikan menggambarkan kualitas individu, masyarakat maupun bangsa. Rendahnya tingkat pendidikan berdampak pada permasalahan yang kompleks. Sektor pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 masih bermasalah karena rata-rata lama sekolah yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktuntasan belajar 12 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbud dan Kemenag. Metode penelitian menggunakan regresi logistik biner multilevel (dua level) yaitu level satu (individu) dan level dua (kabupaten/kota). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 2.720 sampel, terdapat 34,93 persen diantaranya mengalami ketidaktuntasan belajar 12 tahun. Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan pada level satu, yaitu tipe daerah tempat tinggal, jenis kelamin responden, Kepemilikan KIP/PIP, status bekerja responden, pendidikan kepala rumah tangga (KRT). Sedangkan pada level dua yang berpengaruh signifikan adalah jumlah SLTA dan rasio murid guru SLTA. Variasi ketidaktuntasan belajar 12 tahun yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 4,41 persen.

Kata kunci: *Wajib Belajar 12 Tahun, Regresi Logistik Biner Multilevel, Provinsi Sumatera Selatan*

I. PENDAHULUAN

Putus sekolah merupakan permasalahan yang sering terjadi didalam dunia pendidikan. Putus sekolah menurut [1] adalah status yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menuntaskan suatu jenjang pendidikan, sehingga mengakibatkan tidak bisa melanjutkan belajar ke jenjang pendidikan berikutnya. Menurut [2] ada banyak latar belakang terjadinya putus sekolah dalam dunia pendidikan, diantaranya; persoalan ekonomi (keluarga miskin), anak yang bekerja, jumlah anggota keluarga yang banyak, anak memiliki permasalahan di sekolah, jenis kelamin (anak laki-laki diutamakan untuk bersekolah), tindak kriminal, susah mengakses sekolah karena permasalahan jaraknya jauh, bencana alam, serta persoalan keluarga, misal perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan pendidikan tersebut apabila tidak ditangani secara sigap dan sungguh-sungguh akan menyebabkan dampak yang sangat besar. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang memiliki pendidikan rendah ataupun yang mengalami putus sekolah, tetapi juga berimbas terhadap masyarakat sekitar bahkan negara. Rifa'i berpendapat bahwa penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah atau yang mengalami putus sekolah dapat menjadi penyakit dalam suatu masyarakat.

Penduduk yang putus sekolah terutama pada jenjang pendidikan rendah, kemudian tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap ataupun memiliki gaji yang rendah akan menjadi beban bagi masyarakat bahkan dapat menjadi pengganggu ketenteraman masyarakat. Alasannya karena mereka yang mengalami putus sekolah memiliki kekurangan dalam pendidikan ataupun pengalaman intelektual. Selain itu, tidak sedikit penduduk yang mengalami putus sekolah tidak memiliki keterampilan yang mampu menopang kehidupan sehari-hari. Dampak yang paling buruk terjadi ketika mereka mengalami frustrasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap *over-compensation*, maka dapat memunculkan gangguan-gangguan yang dapat meresahkan masyarakat seperti terjadinya perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma sosial. Pendapat yang sejalan juga diungkapkan oleh Chombs dalam [1] bahwa dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan pendidikan yang rendah atau yang mengalami putus sekolah yaitu menjadi buta huruf, patah semangat moral dan dapat menyebabkan kekecewaan yang mendalam, kemerosotan moral, banyak menjadi pengangguran, melakukan kriminalitas, serta kenakalan remaja. Selain berdampak pada masyarakat,

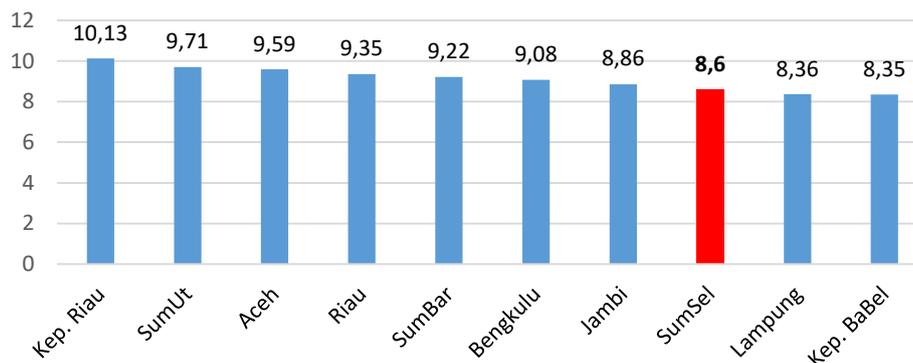
permasalahan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara menjadi kurang kompeten terutama tidak mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dari negara lain. Pemerintah telah menunjuk 13 provinsi sebagai perintis program wajib belajar 12 tahun, diantaranya Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Dasar hukum pelaksanaan program tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan dan Kebudayaan No. 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU). Sasaran pelaksanaan PMU adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 16-18 tahun yang memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan menengah. Dengan begitu, PMU dimaksudkan agar mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK), yang mana akan meningkatkan rata-rata lama sekolah. Hal tersebut sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang ke-4 tentang pendidikan bermutu yaitu memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua (*International Labour Organisation* (ILO), 2018). Pada tahun 2019, terdapat tiga provinsi perintis program wajib belajar 12 tahun yang masuk dalam daftar 10 provinsi yang memiliki laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010) tertinggi di Indonesia, yaitu Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan (BPS, 2019).

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari ketiga provinsi tersebut, maka Provinsi Sumatera Selatan memiliki IPM yang terendah (BPS, 2010). Sumatera Selatan termasuk provinsi yang memiliki pembangunan wilayah yang sangat baik. Pada tahun 2018, Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) sebagai provinsi dengan perencanaan dan pencapaian terbaik kedua tingkat nasional. Pada tahun 2019, laju pertumbuhan PDRB ADHK 2010 merupakan tertinggi di Pulau Sumatera yaitu sebesar 5,69 persen (BPS, 2019). Namun, keberhasilan pembangunan perekonomian tersebut belum diimbangi dengan peran pembangunan manusia. Hal ini dapat dilihat dari IPM, pada tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan masih berada dibawah angka nasional. IPM Provinsi Sumatera Selatan sebesar 70,02 sedangkan IPM Indonesia sudah mencapai angka 71,92. Selain itu, IPM Provinsi Sumatera Selatan berada pada peringkat terendah kedua (setelah Provinsi Lampung) di Pulau Sumatera (BPS, 2019). Salah satu permasalahan yang menyebabkan IPM Provinsi Sumatera Selatan rendah adalah masalah pendidikan yang disebabkan karena program pendidikan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah belum memberikan hasil yang maksimal. Terbukti bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 masih dibawah angka nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



GAMBAR 1. PERBANDINGAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR >15 TAHUN PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN INDONESIA TAHUN 2019. SUMBER: BPS

Gambar 1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur > 15 tahun di Provinsi Sumatera Selatan adalah 8,6. Sedangkan jika dibandingkan dengan RLS Indonesia, maka RLS Provinsi Sumatera Selatan berada dibawah angka nasional. Kemudian perbandingan RLS Provinsi Sumatera Selatan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



GAMBAR 2. RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK UMUR >15 DI PULAU SUMATERA TAHUN 2019. SUMBER: BPS

Gambar 2 diatas menunjukkan RLS Provinsi Sumatera Selatan berada pada peringkat ketiga terendah di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Sumatera Selatan masih belum baik dan perlu ditingkatkan angka partisipasi sekolah. RLS yang rendah bisa disebabkan oleh kecilnya angka partisipasi sekolah masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan. Rendahnya partisipasi sekolah suatu penduduk dapat terjadi ketika banyak penduduk usia sekolah yang putus sekolah ataupun tidak bersekolah sama sekali. Dengan begitu, perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan ataupun penyebab putus sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh [3] menunjukkan bahwa faktor penyebab ketidaktuntasan belajar 12 tahun adalah faktor geografi, jenis kelamin, ekonomi dan juga faktor jenis kelamin kepala rumah tangga (KRT). Referensi [4] melakukan analisis faktor penyebab putus sekolah di salah satu kampung Kota Ambon. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi pendapatan KRT dan tingkat pendidikan KRT. Sedangkan faktor eksternal yaitu budaya masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan paradigma orang tua bahwa pendidikan merupakan hal yang tidak penting. Selanjutnya [5] dari Universitas Pertanian Bogor (IPB) melakukan penelitian tentang putus sekolah dengan regresi logistik menunjukkan hasil bahwa rendahnya pendidikan KRT, jumlah ART lebih dari empat, miskin, tempat tinggal di pedesaan, dan berjenis kelamin laki-laki berpengaruh signifikan terhadap putus sekolah. Kemudian [12] melakukan penelitian menggunakan regresi logistik menunjukkan hasil bahwa pada tingkat signifikansi 5 persen variabel yang signifikan berpengaruh terhadap putus sekolah adalah pendidikan KRT, kepemilikan KIP/PIP, jumlah ART, anak yang bekerja, kemiskinan, dan daerah tempat tinggal.

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi logistik biner multilevel (dua level). Penerapan metode tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui faktor-faktor ketidaktuntasan belajar 12 tahun baik secara individu (level satu) maupun secara kontekstual (kabupaten/kota) (level dua), serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari karakteristik yang terdapat pada masing-masing wilayah terhadap ketidaktuntasan belajar 12 tahun.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi 17 kabupaten/kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2019 yang terdiri dari data Susenas (KOR), data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK 2010), jumlah SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, jumlah guru SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta, dan jumlah siswa/siswi SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Kementerian Agama (Kemenag).

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk menunjukkan gambaran umum terkait data yang digunakan. Sedangkan analisis inferensia pada penelitian ini menggunakan metode regresi logistik biner multilevel (dua level) yaitu level satu (individu) dan level dua (kabupaten/kota). Metode tersebut berguna untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun. Variabel respon dalam penelitian ini adalah status ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun. Sedangkan variabel penjelas untuk level satu terdiri dari jenis kelamin responden, klasifikasi tempat tinggal, jumlah Anggota Rumah

Tangga (ART), status bekerja responden, kepemilikan KIP/PIP, pendidikan Kepala Rumah Tangga (KRT), dan jenis kelamin KRT. Variabel penjelas untuk level dua adalah PDRB ADHK 2010, jumlah SLTA baik negeri maupun swasta, dan rasio murid guru SLTA baik negeri maupun swasta. SLTA dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/ Madrasah Aliyah (MA).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah penduduk usia 18-24 tahun yang belum menikah dan tidak sebagai KRT. Penduduk dikatakan tuntas wajib belajar 12 tahun apabila sudah tamat pendidikan formal jenjang SMA/SMK/MA. Dasar teori untuk usia unit analisis (18 tahun) merujuk pada usia tamat SMA/SMK/MA adalah 18 tahun [6]. Hal senada juga diungkapkan oleh [7] dalam penelitiannya yang menyatakan bahwa tamat SMA sekitar usia 18 tahun. Sedangkan usia 24 tahun merujuk pada pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Sumatera Selatan telah dirintis sejak tahun 2013, dan penelitian ini menggunakan data tahun 2019. Artinya, program wajib belajar 12 tahun di Provinsi Sumatera Selatan sudah berlangsung selama 6 tahun. Sehingga, unit analisis untuk level satu (individu) dalam penelitian ini adalah penduduk usia 18-24 tahun, untuk melihat keberhasilan program wajib belajar 12 tahun yang direalisasikan sejak 2013 di Provinsi Sumatera Selatan.

TABEL 1. VARIABEL PENELITIAN

Teori/Referensi	Nama Variabel	Simbol	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Variabel respon			
	Status ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun	Y	0= Tuntas* 1= Tidak Tuntas
Variabel Penjelas			
Level Satu (Individu)			
Teori Rifa'i (2016; Hal.203-209)	Daerah Tempat Tinggal	X1	0= Perkotaan* 1= Pedesaan
	Jumlah ART	X2	0= Jumlah ART ≤ 4 * 1= Jumlah ART > 4
	Jenis Kelamin Responden	X3	0= Perempuan* 1= Laki-laki
	Kepemilikan KIP/PIP	X4	0= Punya KIP/PIP* 1= Tidak punya KIP/PIP
	Status Bekerja Responden	X5	0= Tidak Bekerja* 1= Bekerja
Aristin (2015), Wassahua (2016), Mujati et al. (2018)	Pendidikan KRT	X6	0=Tamat ≥ SMA/Sederajat * 1=Tamat SMP/Sederajat 2=Tamat ≤ SD/Sederajat
Setiadi et al. (2014), Perhati et al. (2017), Kusbudiyanto & Munandar (2019).	Jenis Kelamin KRT	X7	0= Laki-laki * 1= Perempuan
Level Dua (Kabupaten/Kota)			
Suryadi (2002; Hal.102-104)	Ln PDRB ADHK	X8	Numerik
	Ln Jumlah SLTA	X9	Numerik
	Rasio Murid Guru SLTA	X10	Numerik

Ket: *) = Referensi Kategori

Tahapan analisis regresi logistik biner multilevel (dua level) adalah sebagai berikut:

1. Pengujian signifikansi *Random Effect (Likelihood Ratio Test (LR))*

Pengujian *random effect* dilakukan untuk melihat apakah model regresi logistik biner multilevel tepat digunakan untuk menganalisis data dibandingkan dengan regresi logistik satu level (biasa). Dalam [8], langkah *likelihood ratio test* seperti dibawah ini:

Hipotesis:

H0 : $\sigma_{u0}^2 = 0$ (*random effect* tidak signifikan)

H1 : $\sigma_{u0}^2 > 0$ (*random effect* signifikan)

Statistik uji:

$$LR = -2 \ln \left(\frac{\text{likelihood model tanpa random effect}}{\text{likelihood model dengan random effect}} \right) \sim \chi^2_{(\alpha;1)} \dots \dots \dots (1)$$

Keputusan : Tolak H₀ jika $LR > \chi^2_{(\alpha;1)}$ atau *p-value* < α

2. Menghitung nilai *Intraclass Correlation Coefficient (ICC)*

ICC digunakan untuk melihat seberapa besar keragaman variabel respon yang disebabkan oleh keragaman karakteristik pada level dua. Rumus *ICC* dalam [8] adalah sebagai berikut.

$$ICC = \frac{\sigma_{u0}^2}{\sigma_{u0}^2 + \sigma_e^2} \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

σ_{u0}^2 : Variasi pada *error* level dua

σ_e^2 : Variasi pada *error* level satu (*fixed* mengikuti distribusi *logistic*, standar nilainya $\frac{\pi^2}{3} \approx 3,29$)

3. Uji Signifikansi Parameter

a. Uji Simultan (Uji G)

Pengujian parameter secara simultan dilakukan untuk menguji signifikansi parameter yaitu menguji seluruh variabel penjelas yang digunakan di dalam model secara serentak dalam [9].

Hipotesis:

$H_0: \gamma_{10} = \gamma_{20} = \dots = \gamma_{p0} = \gamma_{01} = \dots = \gamma_{0Q} = 0$ (tidak ada pengaruh variabel penjelas terhadap variabel respon)

H_1 : Minimal ada satu $\gamma_{pq} \neq 0$ (nol) (minimal ada satu variabel penjelas yang berpengaruh terhadap variabel respon)

Statistik uji:

$$G = -2\ln\left[\frac{L_0}{L_p}\right] \sim \chi^2_{(\alpha,d)} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan:

L_0 : nilai *likelihood* tanpa variabel penjelas (*null model*)

L_p : nilai *likelihood* dengan p variabel penjelas (*conditional model*)

Keputusan: tolak H_0 jika $G > \chi^2_{(\alpha,d)}$ dimana d adalah parameter di level satu dan level dua.

b. Uji Parsial (Uji Wald)

Pengujian secara parsial bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel penjelas terhadap variabel respon. Dalam [10] uji Wald adalah sebagai berikut.

Hipotesis:

- Untuk parameter level satu.

Hipotesisnya adalah $H_0 : \gamma_{p0} = 0$ dan $H_1 : \gamma_{p0} \neq 0 ; p=1,2,\dots,P$.

Statistik uji:

$$W = \left[\frac{\gamma_{p0}}{se(\gamma_{p0})}\right] \sim N(0,1) \dots \dots \dots (4)$$

- Untuk parameter level dua

Hipotesisnya adalah $H_0 : \gamma_{0q} = 0$ dan $H_1 : \gamma_{0q} \neq 0 ; q=1,2,\dots,Q$.

$$W = \left[\frac{\gamma_{0q}}{se(\gamma_{0q})}\right] \sim N(0,1) \dots \dots \dots (5)$$

Keputusan: tolak H_0 jika $W > Z_{\alpha/2}$ atau *p-value* $< \alpha$

c. Model Regresi Logistik Biner Multivel (Dua Level)

$$\eta = \ln\left(\frac{\pi_{ij}}{1-\pi_{ij}}\right) = \gamma_{00} + \sum_{p=1}^P \beta_{pj} X_{pij} + \sum_{q=1}^Q \gamma_{0q} Z_{qj} + U_{0j} + \epsilon_{ij} \dots \dots \dots (6)$$

Untuk menyamakan notasi β diubah menjadi γ sehingga:

$$\beta_{pj} = \gamma_{p0} \quad \text{untuk } p > 0$$

Keterangan:

η : *link function* dari logistik biner

γ_{00} : *intercept*

γ_{p0} : efek tetap (*fixed slope*) untuk variabel penjelas ke-p di level 1, $p=1, 2, \dots, P$

γ_{0q} : efek tetap untuk variabel penjelas ke-q di level 2

X_{pij} : variabel penjelas ke-p di level satu untuk individu ke-i dalam kelompok ke-j pada level dua, $p=1, 2, \dots, P$

Z_{qj} : variabel penjelas ke-q di level 2 untuk kelompok ke-j, $q= 1, 2, \dots, Q$

U_{0j} : random effect kelompok ke-j pada level dua

\mathcal{E}_{ij} : residual individu ke-i pada level satu dan kelompok ke-j pada level dua

4. Menghitung Odds Ratio

Odds ratio digunakan untuk interpretasi parameter yaitu melihat kecenderungan terhadap kejadian sukses ($x=1$) dalam suatu penelitian dibandingkan dengan kejadian gagal ($x=0$). Rumus odds ratio dalam [9] adalah sebagai berikut.

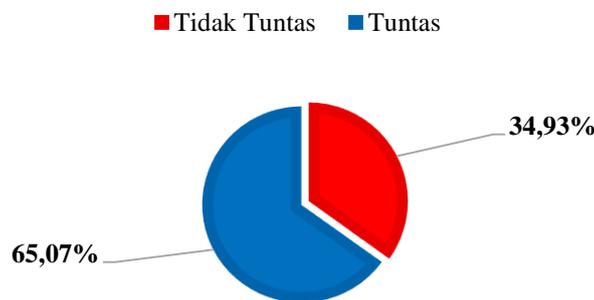
$$OR = \frac{\pi(1)/[1-\pi(1)]}{\pi(0)/[1-\pi(0)]}$$

$$OR = \frac{\frac{\exp(\gamma_0 + \gamma_j)}{1 + \exp(\gamma_0 + \gamma_j)}}{\frac{1}{1 + \exp(\gamma_0 + \gamma_j)}} \cdot \frac{\frac{1}{1 + \exp(\gamma_0)}}{\frac{\exp(\gamma_0)}{1 + \exp(\gamma_0)}} = \frac{\exp(\gamma_0 + \gamma_j)}{\exp(\gamma_0)} = \exp(\gamma_j) \dots\dots\dots(7)$$

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Jumlah sampel penduduk usia 18-24 yang belum kawin dan tidak sebagai KRT adalah 2.720 jiwa. Dari data, diperoleh informasi bahwa masih banyak yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 3 berikut ini.



GAMBAR 3. PERBANDINGAN PERSENTASE PENDUDUK USIA 18-24 TAHUN BERDASARKAN STATUS KETIDAKTUNTASAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019. SUMBER: SUSENAS (KOR), MARET 2019 (DIOLAH)

Gambar 3 memberikan informasi bahwa terdapat 34,93 persen penduduk usia 18-24 tahun yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Sumatera Selatan masih rendah. Hal ini sesuai dengan RLS Provinsi Sumatera Selatan yang masih rendah bahkan dibawah angka nasional. Data RLS Provinsi Sumatera tahun 2019 yaitu 8,60 sedangkan RLS Indonesia mencapai angka 8,75. Selain itu, Provinsi Sumatera Selatan jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatera berada pada peringkat ketiga terendah. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) (BPS).

Berdasarkan hasil analisis deskriptif data, gambaran umum karakteristik penduduk yang mengalami putus sekolah lebih banyak tinggal di wilayah pedesaan, jumlah ART lebih dari empat, jenis kelamin responden laki-laki, tidak memiliki KIP/PIP, responden bekerja, KRT laki-laki, serta pendidikan KRT yang rendah. Putus sekolah lebih banyak terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Data menunjukkan bahwa 69,47 persen penduduk yang mengalami putus sekolah tinggal di wilayah pedesaan. Putus sekolah juga lebih banyak terjadi pada penduduk yang memiliki ART lebih dari empat. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat 51,68 persen penduduk yang mengalami putus sekolah dan memiliki ART lebih dari empat. Selanjutnya, karakteristik penduduk yang mengalami putus sekolah jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka 80,42 persen yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun adalah laki-laki. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum laki-laki usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan perempuan. Kemudian, hasil analisis data menunjukkan bahwa penduduk yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun secara umum tidak memiliki KIP/PIP (97,68 persen). Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan data pendidikan KRT maka hasilnya 67,05

persen yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun adalah mereka yang memiliki KRT dengan tamatan SD/Sederajat atau tidak bersekolah sama sekali, 21,16 persen KRT tamatan SMP/Sederajat, dan 11,79 persen KRT tamatan SMA/Sederajat keatas. Data tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan KRT maka semakin tinggi pula kesadaran terhadap pendidikan anggota rumah tangganya dengan ditandai menurunnya persentase yang tidak tuntas wajib belajar 12 tahun. Terakhir, hasil analisis deskriptif terkait variabel respon pada masing-masing kabupaten/kota, maka Kabupaten Pagar Alam, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Lubuklinggau memiliki PDRB ADHK 2019 peringkat tiga terendah. Sedangkan jika dilihat dari jumlah sekolah SLTA pada masing-masing wilayah, maka tiga wilayah dengan jumlah sekolah yang sedikit diantara kabupaten/kota lainnya adalah Pagar Alam, Musi Rawas Utara dan Empat Lawang. Terakhir, berdasarkan rasio murid guru SLTA, maka tiga kabupaten/kota yang memiliki rasio murid guru SLTA yang tinggi adalah Musi Rawas Utara, Musi Rawas, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

B. Hasil Analisis Inferensia

Pengujian Signifikansi *Random Effect (Likelihood Ratio Test)* didapatkan *p-value* 0,000 dan *Likelihood Ratio (LR)* sebesar 46,75. Pada α sebesar 0,05 dan $\chi^2_{(0,05;1)}$ sebesar 3,84, maka diperoleh $LR > \chi^2_{(0,05;1)}$ dan *p-value* < 0,05 yang berarti tolak H_0 . Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 0,05 terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa *random effect* signifikan dan model regresi logistik biner multilevel (dua level) lebih baik dibandingkan dengan model regresi logistik biasa (satu level) dalam menganalisis ketidaktuntasan belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Selanjutnya, nilai *ICC* dari *null model* yaitu sebesar 0,0441306. Dengan begitu, keragaman variabel Y dapat dijelaskan sebesar 4,41 persen oleh perbedaan karakteristik yang terjadi pada level wilayah (kabupaten/kota). [11] menjelaskan bahwa analisis multilevel tepat digunakan pada data yang memiliki data berstruktur hierarki meskipun memiliki nilai *ICC* yang sangat kecil atau bahkan mendekati nol. Selanjutnya, pengujian parameter secara simultan dengan menggunakan rumus pada persamaan 3 didapatkan nilai G sebesar 340,80 yang mana nilainya lebih besar dibandingkan $\chi^2_{(0,05;11)}$ sebesar 19,68. Berdasarkan hasil uji tersebut maka dapat diputuskan tolak H_0 . Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95 persen terdapat minimal satu variabel penjelas yang berpengaruh secara signifikan terhadap ketidaktuntasan belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Kemudian dilakukan pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa variabel individu (level 1) yang signifikan berpengaruh terhadap ketidaktuntasan belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 adalah tipe daerah, jenis kelamin responden, kepemilikan KIP/PIP, status bekerja responden, pendidikan KRT, dan jenis kelamin KRT. Kemudian untuk variabel kabupaten/kota (level 2) yang berpengaruh signifikan adalah jumlah SLTA dan rasio murid guru SLTA. Sedangkan untuk variabel jumlah anggota rumah tangga dan PDRB ADHK 2010 tidak signifikan berpengaruh terhadap ketidaktuntasan belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019. Berikut adalah hasil dari pengujian parameter secara parsial menggunakan uji Wald.

TABEL 2. HASIL ESTIMASI PARAMETER MODEL REGRESI LOGISTIK BINER MULTILEVEL DENGAN *RANDOM INTERCEPT* (UJI WALD)

Variabel (1)	Koefisien (2)	Standar Error (3)	Z (4)	p> Z (5)	Odds Ratio (6)
Variabel Penjelas Level Satu (Individu)					
Tipe Daerah Perkotaan (ref) Pedesaan	0,4759663	0,1159529	4,10	0,000*	1,609569
Jumlah ART ≤4 (ref) >4	0,0903911	0,089514	1,01	0,313	1,094602
Jenis Kelamin Responden Perempuan (ref) Laki-laki	1,224298	0,0993862	12,32	0,000*	3,401776
Kepemilikan KIP/PIP Ya (ref) Tidak	1,456495	0,2417815	6,02	0,000*	4,290895
Status Bekerja Responden Tidak Bekerja (ref) Bekerja	0,1834351	0,0893697	2,05	0,040*	1,201337

Pendidikan KRT Tamat≥SMA/Sederajat(ref) Tamat=SMP Tamat≤SD	0,2096677 0,6770486	0,1472374 0,1035361	1,42 6,54	0,154 0,000*	1,233268 1,968061
Jenis Kelamin KRT Laki-laki (ref) Perempuan	0,4734422	0,1279014	3,70	0,000*	1,605511
Variabel Penjelas Level Dua (Kabupaten/Kota)					
Ln PDRB ADHK	-0,279731	0,1279014	-1,57	0,117	0,7559873
Ln Jumlah SLTA	0,542587	0,2667345	2,03	0,042*	1,720452
Rasio Murid Guru SLTA	0,066609	0,0285422	2,33	0,020*	1,068877
<i>Intercept</i>	1,184206	4,231016	0,28	0,780	3,268092

Keterangan: *) signifikan pada $\alpha = 0,05$, ref = referensi kategori

Berdasarkan Tabel 2 diatas, maka diperoleh persamaan regresi logistik biner multilevel (dua level) dengan *random intercept* sebagai berikut:

$$\ln \left(\frac{\hat{\pi}}{1 - \hat{\pi}_{ij}} \right) = 1,184206 + 0,4759663 \text{ Tipe Daerah}^*_{ij} + 0,0903911 \text{ Jumlah ART}_{ij} \\ + 1,224298 \text{ Jenis Kelamin (JK)}^*_{ij} + 1,456495 \text{ Kepemilikan KIP/PIP}^*_{ij} \\ + 0,1834351 \text{ Status Bekerja}^*_{ij} + 0,2096677 \text{ PendKRT}_{D1ij} \\ + 0,6770486 \text{ PendKRT}^*_{D2ij} + 0,4734422 \text{ Jenis Kelamin (JK) KRT}^*_{ij} \\ - 0,2797306 \text{ Ln PDRBADHK} + 0,542587 \text{ Ln Jumlah SLTA}^* \\ + 0,066609 \text{ Rasio Murid Guru}^*$$

Interpretasi Odds Ratio

Nilai *odds ratio* dari variabel tipe daerah yaitu sebesar 1,61, artinya kecenderungan penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan yang tinggal di wilayah pedesaan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun 1,61 kali dibandingkan dengan mereka yang tinggal di wilayah perkotaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [12] yang menyebutkan bahwa faktor geografis yaitu kecenderungan penduduk yang tinggal di pedesaan lebih besar untuk tidak menamatkan pendidikan hingga SMA dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan. [13] menyatakan terkait faktor kemudahan akses yang didekati dengan jarak antara rumah dan sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan siswa/siswi untuk putus sekolah.

Nilai *odds ratio* dari variabel jenis kelamin responden yaitu sebesar 3,40, artinya bahwa kecenderungan penduduk laki-laki usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun yaitu 3,40 kali dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [14] dalam hasil penelitiannya yang menyebutkan bahwa laki-laki memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk putus sekolah dibandingkan dengan perempuan. Dijelaskan pula bahwa laki-laki merupakan sumber tenaga kerja dalam keluarga yang bisa menambah pendapatan keluarga.

Nilai *odds ratio* dari variabel kepemilikan KIP/PIP yaitu sebesar 4,30, artinya bahwa kecenderungan penduduk usia 18-24 tahun yang tidak memiliki KIP/PIP di Provinsi Sumatera Selatan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun yaitu 4,30 kali dibandingkan dengan penduduk yang memiliki KIP/PIP. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [12] yang menunjukkan bahwa kepemilikan KIP/PIP berpengaruh besar terhadap putus sekolah. Hakim menyatakan bahwa bantuan pemerintah di bidang pendidikan sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Sesuai tujuan pemberian KIP/PIP dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang PIP (pasal 2 poin a) untuk meningkatkan akses bagi anak usia 9 sampai 21 tahun dalam mendapatkan layanan pendidikan menengah dalam rangka mendukung pelaksanaan rintisan wajib belajar 12 tahun. Bantuan tersebut, diberikan dalam bentuk uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Nilai *odds ratio* dari variabel status bekerja responden yaitu sebesar 1,20, artinya bahwa kecenderungan penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan yang bekerja untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun yaitu 1,20 kali dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja. [15] menyebutkan pada kasus anak yang berasal dari keluarga yang perekonomiannya lemah maka terpaksa harus bekerja untuk

membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga, kegiatan sekolah seorang anak akan menjadi terganggu apabila bekerja, terutama mereka yang bekerja untuk bisa membantu perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Nilai *odds ratio* dari KRT yang berpendidikan kurang dari atau sama dengan SD/Sederajat yaitu sebesar 1,97, artinya bahwa kecenderungan penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan dengan KRT yang berpendidikan tamat kurang dari atau sama dengan SD/Sederajat untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun yaitu 1,97 kali dibandingkan dengan penduduk yang KRT-nya berpendidikan lebih dari atau sama dengan SMA/Sederajat. Dalam dua penelitian yang berbeda yaitu [16] menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan orang tua yang rendah sangat berpengaruh terhadap putus sekolah. Orang tua yang berpendidikan rendah menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, sehingga tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan yang tinggi.

Nilai *odds ratio* dari variabel jenis kelamin KRT yaitu sebesar 1,61, artinya bahwa kecenderungan penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan yang KRT-nya berjenis kelamin perempuan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun yaitu 1,61 kali dibandingkan dengan penduduk yang KRT-nya berjenis kelamin laki-laki. [5] dalam penelitiannya mendapati bahwa banyak anak putus sekolah yang KRT-nya berjenis kelamin perempuan. Disebutkan bahwa hal itu terjadi karena KRT perempuan membutuhkan anak-anaknya untuk bekerja guna membantu perekonomian keluarga yaitu menambah pendapatan keluarga.

Nilai *odds ratio* dari variabel jumlah SLTA yaitu sebesar 1,72, artinya setiap penambahan jumlah SLTA yang dialokasikan pada setiap wilayah maka kecenderungan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan bertambah sebesar 1,72 kali. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] bahwa jumlah sekolah berpengaruh negatif secara signifikan terhadap angka partisipasi sekolah (APS). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah sekolah maka angka partisipasi sekolah akan mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

Nilai *odds ratio* dari variabel rasio murid guru SLTA yaitu sebesar 1,07, artinya setiap penambahan rasio murid guru pada setiap wilayah maka kecenderungan untuk tidak tuntas wajib belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan akan bertambah sebesar 1,07 kali. Pada penelitian yang dilakukan oleh [18] di Provinsi Papua terkait partisipasi sekolah menunjukkan hasil bahwa jumlah guru yang terbatas mempengaruhi rendahnya angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua. Selain jumlah guru yang terbatas juga karena distribusi guru yang tidak merata. Ketersediaan guru yang memadai sangat berdampak pada keberhasilan peningkatan partisipasi sekolah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Variabel-variabel individual (level 1) yang signifikan berpengaruh terhadap ketidaktuntasan belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan adalah tipe daerah tempat tinggal, jenis kelamin responden, kepemilikan KIP/PIP, status bekerja responden, pendidikan KRT, serta jenis kelamin KRT. Sedangkan variabel wilayah (level 2) adalah jumlah SLTA dan rasio murid guru SLTA. Persentase keragaman ketidaktuntasan wajib belajar 12 tahun penduduk usia 18-24 tahun di Provinsi Sumatera Selatan disebabkan oleh perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota sebesar 4,41 persen.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terutama orang tua bahwa pendidikan itu sangat penting. Orang tua sebaiknya tidak menyarankan dan/atau melarang anaknya yang masih usia sekolah untuk bekerja. Selain itu, anak laki-laki diberikan pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya pendidikan dalam menunjang masa depan mereka. Sehingga mereka diharapkan mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA/Sederajat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumarni, Sani, D. Q., Wahyudin, M. R. S. (2020). *Pelayanan Sosial Remaja Putus Sekolah: Studi Layanan di UPT. Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang Jawa Timur*. Kota Malang: Intelegensia Media.
- [2] Rifa'i, M. (Ed.). (2016). *Sosiologi Pendidikan: Struktur Interaksi Sosial di dalam Institusi Pendidikan/Muhammad Rifa'i (3rd ed.)*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- [3] Setiadi, Y., Kurniawan, R., & Diantoro, D. G. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidaktuntasan Belajar 12 Tahun Pada Penduduk Usia 18 Tahun Keatas Di Provinsi Papua Barat Berdasarkan Hasil Susenas Tahun 2011 Provinsi Papua Barat.
- [4] Wassahua, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Di Kampung Wara Negeri Hative Kecil Kota Ambon. *Al-Iltizam*, 1(2), 93–113.
- [5] Perhati, T. A., Indahwati, & Susetyo, B. (2017). *Identifikasi Karakteristik Anak Putus Sekolah Di Jawa Barat Dengan Regresi Logistik*. *Indonesian Journal of Statistics and Applications*, 1(1), 56–62.
- [6] Atmanti, H. D. (2005). *Investasi Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan*. *Dinamika Pembangunan*, 2(1), 30–39.

- Aulia R, M., & Yulhendri, Y. (2020). Pengaruh Anggaran Pendidikan, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas terhadap Partisipasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. In *Jurnal Ecogen*. 3(5).155-164.
- [7] Suryadarma, D., Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2006). *Causes of Low Secondary School Enrollment in Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- [8] Hox, J. J. (2010). *Multilevel Analysis Second Edition* (G. A. Marcoulides (Ed.); 2nd ed.). Routledge.
- [9] Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Wiley Seriu in Probability and Stlltisrics Applied Logistic Regression Second Edition* (2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.,
- [10] Agresti, A. (2007). *An Introduction to Categorical Data Analysis Second Edition* (A. Agresti (Ed.); 2nd ed.). John Wiley & Sons, Inc.,
- Amir, F., Ashar, K., & Pratomo, D. S. (2011). Pengaruh Budaya & Bargaining Power Terhadap Partisipasi Kerja dan Sekolah Anak di JawaTimur. *Chemical Engineer*, 12(1), 1–9
- [11] Nezlek, J. (2008). *Multilevel Modeling for Social and Personality Psychology*. *Multilevel Modeling for Social and Personality Psychology*, 2(2), 842–860.
- [12] Hakim, A. (2020). *Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah*. *Jurnal Pendidikan*, 21(2), 122–132.
- [13] Rahmadeni, Samsinar, & Desvina, A. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Angka Partisipasi Sekolah Di Provinsi Riau Menggunakan Model Spatial Autoregressive. 644–650.
- [14] Kusbudiyanto, L., & Munandar, A. I. (2020). *Karakteristik Siswa Putus Sekolah Pada Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (Smk) Di Kota Bekasi*. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 6(2), 298-318.
- [15] Asmara, Y. R. I., & Sukadana, I. W. (2017). *Mengapa Angka Putus Sekolah Masih Tinggi? (Studi Kasus Kabupaten Buleleng Bali)*. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(12), 1348–1349.
- [16] Aristin, N. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Anak Putus Sekolah Tingkat Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 20(1), 30–36.
- [17] Rahmatin, U. Z., & Soejoto, P. D. . A. (2017). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Sekolah Terhadap Angka Partisipasi Sekolah (Aps) Di Kota Surabaya. In *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. 1(2). 127-140.
- [18] Maharani, K. (2019). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketercapaian Angka Partisipasi Sekolah Di Papua (Studi Kasus Di Kabupaten Merauke)*. [Thesis]. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.